



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : 1. Kepala BKKBN
2. Kepala Badan POM
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 9 Juli 2012
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Acara : Membahas Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011
Ketua Rapat : Ir. Soepriyatno/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : orang anggota dari 51 Anggota Komisi IX ... orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI dibuka pada pukul 16.15 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan terbuka untuk umum.

- b. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN untuk terus meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang baik, sehingga laporan keuangan Tahun Anggaran 2012 mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni".
2. Setelah mendengarkan penjelasan Sestama BKKBN, Komisi IX DPR RI dapat menerima pertanggungjawaban BKKBN atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, dengan catatan sebagai dasar pelaksanaan untuk perbaikan program/kegiatan tahun anggaran 2012 sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) dan sosialisasinya harus diperkuat terutama di wilayah Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);
 - b. Perlunya peningkatan upaya monitoring dan evaluasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) secara berkelanjutan;
 - c. Mengusulkan penghapusan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berstatus macet kepada Kementerian Keuangan RI;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas laporan keuangan BKKBN Tahun Anggaran 2011.

B. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

1. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Badan POM RI yang telah mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni" dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Badan POM RI Tahun Anggaran 2011 dan meminta Badan POM RI untuk terus mempertahankan performa pengelolaan keuangan negara yang baik.
2. Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Badan POM, Komisi IX DPR-RI dapat menerima pertanggungjawaban Badan POM atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 dengan catatan sebagai dasar pelaksanaan untuk perbaikan program/kegiatan Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia khususnya yang berasal dari impor;
 - b. Memperkuat pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
 - c. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Rapat diakiri pada pukul 18.05 WIB

Jakarta, 9 Juli 2012